



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 32 ( <i>tiga puluh dua</i> )
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI
Hari, Tanggal	: Kamis, 8 Juli 2021
Pukul	: 11.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai usulan BUMN Penerima Penyerahan Modal Negara Tahun 2022
Hadir	: 1. orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Erick Tohir. 3. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury. 4. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoartmojo. 5. Sekretaris Menteri BUMN dan para Deputi Kementerian BUMN, Susyanto. 6. Staf Khusus III, Arya Sinulingga. beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dibuka pada pukul 11.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 8 Juli 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mendorong Menteri BUMN RI agar capaian realisasi dividen yang dibagikan oleh BUMN meningkat setiap tahunnya, seimbang dengan jumlah Penyertaan Modal Negara (PMN).
2. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan Kementerian BUMN terkait rencana Tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 dan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 kepada beberapa BUMN dengan rincian sebagai berikut:

BUMN Penerima PMN	Nominal PMN	Tujuan Penggunaan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Rp. 7,9 Triliun	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
PT KAI (Persero)	Rp. 7,0 Triliun	Dukungan menjalankan PSN LRT dan pemenuhan <i>base equity</i> KCIC.
PT Utama Karya (Persero)	Rp. 19,0 Triliun	Tambahan dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
<b>Total</b>	<b>Rp. 33,9 Triliun</b>	
PT Utama Karya (Persero)	Rp. 31,35 Triliun	Mendukung pembangunan jalan tol trans sumatera.
PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	Rp. 9,318 Triliun	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika
PT PLN (Persero)	Rp. 8,321 Triliun	Program Pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan, transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan tahun 2021 - 2022
PT BNI (Persero) Tbk.	Rp. 7,0 Triliun	Penguatan modal untuk meningkatkan <i>Tier I Capital</i> dan <i>CAR</i> .
PT KAI – KCJB	Rp. 4,1 Triliun	Dukungan dalam rangka PSN Kereta Cepat untuk menutup <i>cost overrun</i> .
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Rp. 3,0 Triliun	Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Rp. 2,0 Triliun	Restrukturisasi Jiwasraya.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Rp. 2,0 Triliun	Penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian
Perum Perumnas	Rp. 2,0 Triliun	Program perumahan rakyat Jakarta dan Medan untuk MBR.
PT BTN (Persero) Tbk.	Rp. 2,0 Triliun	Penguatan modal untuk meningkatkan <i>Tier I Capital</i> dan <i>CAR</i> .
PT RNI (Persero)	Rp. 1, 2 Triliun	Penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan dan UMKM
Perum Damri	Rp.0,25 Triliun	Penyediaan Armada untuk program penugasan.
<b>Total</b>	<b>Rp. 72,449 Triliun</b>	

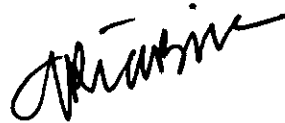
Disamping usulan PMN Tunai di atas, maka diusulkan untuk bisa memberikan PMN Non-Tunai yang berasal dari konversi RDI-SLA menjadi PMN di BUMN Pangan dan BUMN Industri Pertahanan.

3. Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman terhadap masing-masing BUMN penerima tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 dan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk memastikan penambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 dan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dapat meningkatkan kinerja BUMN dan kontribusi kepada Pemerintah dalam bentuk dividen serta pertumbuhan perekonomian nasional khususnya di tengah masa pandemi Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN sektor farmasi dan layanan kesehatan rumah sakit agar dapat memitigasi dampak Covid-19 melalui penyediaan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,



ARIA BIMA  
A-189